

B A B IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



B A B IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global. Hal ini disebabkan karena produk ekonomi daerah ini sebagian besar merupakan produk yang berorientasi ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar nasional dan global. Penyebab lainnya yaitu kegiatan ekonomi masih sangat tergantung pada pengelolaan sumber daya alam. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah, pengembangan industri pengolahan, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, serta pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan prioritas bidang ekonomi diuraikan sebagai berikut:

A. Ekonomi kerakyatan

Pengelolaan ekonomi yang mengarah pada pengembangan ekonomi kerakyatan adalah langkah-langkah strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dengan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi melalui optimalisasi pengembangan potensi lokal yang berorientasi ekspor, seperti lada, karet, hasil laut dan hasil pertambangan. Langkah ini jika dilaksanakan dengan baik, berkelanjutan dan profesional, maka akan dapat meningkatkan daya saing daerah. Selanjutnya penyebaran masyarakat Bangka Belitung yang masih banyak berdomisili di wilayah perdesaan menjadi potensi penting untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Data BPS Bangka Belitung, 2011 diketahui bahwa sebaran penduduk miskin dari tahun 2007 sampai dengan 2011 masih dominan berada di daerah perdesaan. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan desa masih mencapai

6,91%, sedangkan di kota hanya 3,35%. Jadi pengembangan ekonomi kerakyatan akan menjadi langkah strategis bagi pengurangan kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat desa secara utuh dan terus menerus menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Pengembangan ekonomi kerakyatan di Bangka Belitung selama ini belum berjalan secara optimal. Munculnya permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produksi dan minimnya jiwa wirausaha. Kondisi ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Bangka Belitung, khususnya di perdesaan yang dominan bekerja di sektor primer. Di sisi yang lain, belum berkembangnya lembaga koperasi yang berbasis potensi lokal, masalah pemasaran, serta masih terkendalanya permodalan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Upaya pengembangan ekonomi kerakyatan membutuhkan dukungan sektor lain, seperti sektor perbankan, industri, pertanian, perikanan, dan lain-lain, yang dapat mendorong sektor-sektor ekonomi rakyat untuk dapat lebih maju, mandiri dan berdaya saing. Jadi, kebijakan-kebijakan pada sektor-sektor lain tersebut harus pula menopang dan bersinergi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan ekonomi kerakyatan sangat terkait dengan permasalahan ekonomi yang lain, seperti daya saing, inflasi, pengembangan pariwisata, kelautan, perikanan dan lain-lain. Sektor-sektor ekonomi kerakyatan dapat maju ketika mampu berdaya saing dan dikembangkan sesuai dengan potensi lokal, kondisi geografis, serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengembangan sektor pariwisata, kelautan, perikanan, pertanian dan lain-lain dapat mendukung berbagai pengembangan ekonomi kerakyatan.

Di samping itu, mengoptimalkan keunggulan komparatif juga penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Keunggulan-keunggulan ini misalnya dapat digali dari kekhasan daerah yang tidak dimiliki daerah lain sehingga sektor ekonomi kerakyatan yang dikembangkan memiliki keunggulan dan bersifat lokal, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan sebagai provinsi kepulauan.

B. Peningkatan daya saing daerah

Daya saing daerah dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Untuk memperkuat daya saing daerah, Bangka Belitung harus memenuhi beberapa alat ukur daya saing daerah, yaitu:

- *Perekonomian Wilayah*, yang meliputi upaya penciptaan nilai tambah, tingkat konsumsi, akumulasi capital dan tingkat biaya hidup;
- *Keterbukaan*, berhubungan dengan wilayah lain misalnya dalam hal investasi, perdagangan, dan akses transportasi;
- *Sistem Keuangan*, meliputi sistem finansial perbankan dan non perbankan;
- *Infrastruktur dan SDA*, meliputi modal fisik, geografis dan sumber daya alam;
- *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, penerapannya dalam aktivitas yang menghasilkan nilai tambah;
- *Sumber Daya Manusia*, bertujuan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas SDM;
- *Kelembagaan*, meliputi lembaga sosial, politik, hukum dan aspek keamanan;
- *Kebijakan Pemerintah*, meliputi perencanaan pembangunan dan peraturan-peraturan daerah; dan
- *Manajemen dan Ekonomi Makro*, meliputi organisasi, pemasaran, inflasi, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kemampuan ekonomi daerah, seperti pada konsumsi rumah tangga perkapita serta Nilai Tukar Petani (NTP). Konsumsi rumah tangga perkapita dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terus mengalami peningkatan. Begitupula dengan NTP. Peningkatan ini akan mendorong kemampuan ekonomi daerah, serta secara otomatis meningkatkan pula daya saing daerah.

C. Pengembangan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau terpencil

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang mempunyai luas lautan 65.301,00 km² atau 79,90 % dari luas wilayah keseluruhan. Dengan

memperhatikan kondisi geografis tersebut, maka pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau terpencil menjadi perhatian serius agar tercipta keseimbangan pembangunan antara daerah kontinental dengan wilayah laut/pulau-pulau yang ada di Bangka Belitung.

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian daerah. Pengelolaan wilayah harus dilakukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Potensi pengolahan hasil laut, wisata bahari dan pembangunan pulau-pulau kecil harus menjadi fokus pembangunan ekonomi masyarakat pesisir.

D. Inflasi

Inflasi menjadi perhatian dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tingkat inflasi di provinsi ini mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2007 inflasi mencapai angka 2,64, sedangkan tahun 2008 naik menjadi 18,40. Namun pada tahun 2009 kembali turun menjadi 2,17. Terakhir pada tahun 2011 tingkat inflasi berada pada angka 5,00. Jadi rata-rata pertumbuhan inflasi selama 4 tahun adalah 8,51. Salah satu tingkat inflasi yang cukup tinggi dan mendapat perhatian adalah Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi. Pangkalpinang menjadi salah satu kota yang menjadi referensi dalam penilaian inflasi di Indonesia. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap pembangunan karena tingkat harga di Bangka Belitung cukup tinggi.

Di sisi lain dampak inflasi yang tinggi juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian dan sosial budaya, seperti menambah angka kemiskinan dan pengangguran. Ada beberapa faktor penyebab naik turunnya angka inflasi di Bangka Belitung, seperti naiknya harga kebutuhan pokok, kebutuhan pertanian, *supply-demand*, psikologis musim, masyarakat yang konsumtif, transportasi, termasuk adanya budaya Cheng Beng yang sedikit banyak mempengaruhi angka inflasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang melibatkan semua *stakeholder* terkait

untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis multisektor untuk pengendalian angka inflasi.

E. Disparitas pembangunan

Gambaran pembangunan di Bangka Belitung menunjukkan banyak kemajuan, baik pembangunan fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Namun tidak dapat dihindari bahwa pembangunan yang dilaksanakan masih belum optimal sehingga terjadinya disparitas pembangunan, terutama antara kawasan desa dan kota. Keterkaitan pembangunan desa dan kota tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kedua kawasan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu kota berfungsi sebagai pusat jasa dan perdagangan, sedangkan desa sebagai penopang produksi dan produktivitas. Sebagai daerah yang memiliki 306 perdesaan di 46 kecamatan, maka sudah selayaknya pembangunan yang dilaksanakan akan lebih difokuskan kepada percepatan pembangunan perdesaan dengan memperkuat kelembagaan perdesaan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan antara kota dan desa.

Salah satu indikator untuk melihat disparitas pembangunan secara makro, yakni perbandingan nilai PDRB antar kabupaten/kota. Berdasarkan PDRB kabupaten/kota, pada tahun 2011 terlihat bahwa PDRB atas harga konstan maupun harga berlaku bahwa Kabupaten Bangka dan Bangka Barat yang cukup tinggi. Sedangkan 4 (empat) kabupaten/kota yang lain masih di bawah standar provinsi. Khusus untuk Kabupaten Belitung Timur, PDRB atas harga konstan maupun atas harga berlaku berada di urutan terendah.

F. Pengembangan pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya wisata minat khusus, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata sejarah dan lain-lain. Di antara jenis objek wisata yang paling dominan di provinsi ini adalah wisata alam terutama wisata pantai, dengan

hamparan pantai yang berpasir putih, panorama yang indah, air yang jernih dan pada beberapa tempat dihiasi batuan granit.

Dengan memperhatikan geoposisi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I), maka sektor pariwisata dapat berkembang karena daerah ini dapat menjadi sebagai daerah transit dari Australia menuju Asia Tenggara dan Asia Timur maupun Asia Selatan dan sebaliknya.

Saat ini, pengembangan pariwisata di Bangka Belitung masih terkonsentrasi pada pengembangan wisata alam, sementara wisata sejarah, wisata budaya, dan kuliner masih belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan sektor kepariwisataan ke depan kiranya memperhatikan aspek pengembangan wisata alam dan wisata budaya, sejarah, kuliner, yang ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Rendahnya kualitas dan kuantitas promosi wisata akan sangat berpengaruh sulitnya daerah menjadi tujuan wisata utama. Potensi destinasi wisata yang ada di daerah-daerah strategis baru dan daerah pemekaran belum tergarap secara maksimal. Untuk itu pengembangan destinasi unggulan di masing-masing daerah perlu segera dilaksanakan.

G. Ketahanan pangan

Ketahanan pangan dalam negeri masih menjadi perhatian khusus karena pertumbuhan produksi pangan masih belum stabil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih mengimpor. Di sisi lain, terakhir rata-rata pertumbuhan produksinya masih lebih rendah dari pertumbuhan penduduk. Memperhatikan keadaan tersebut, hal ini jelas akan mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan di Bangka Belitung karena hanya mampu menyediakan kebutuhan pangan sekitar 14,22%, sedangkan sisa kebutuhan pangan lain masih tergantung dari daerah lain.

Meskipun produksi pangan dari luar daerah meningkat secara signifikan, tetapi permasalahan pangan khususnya masih rendahnya produksi pangan dan distribusi yang belum merata masih saja terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mendorong swasembada pangan pokok yang sangat rentan terhadap lonjakan

harga dan guna mengurangi ketergantungan, serta solusi dari terhambatnya distribusi dari luar daerah.

H. Kelautan dan perikanan

Sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di Bangka Belitung. Dengan luas laut sekitar 79,90%, maka sudah selayaknya sektor ini harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi perikanan di sini didominasi oleh perikanan laut karena lokasi daerah ini secara geografis dikelilingi oleh laut, selat, dan pulau-pulau kecil. Selain sumber daya laut, juga memiliki potensi untuk budidaya air tawar dan payau. Potensi sumber daya perikanan tangkap dengan luas areal 65.301 Km² sebesar 499.500 ton/tahun dengan nilai ekonomis Rp. 2.497.500.000.000,00. Jenis ikan yang dominan di perairan ini antara lain: tenggiri, tongkol, kembung, laying, selar, tembang, kakap, kerapu, bawal hitam, bawal putih, kerisi, ekor kuning, udang windu dan udang putih.

Selain potensi perikanan tangkap tersebut, wilayah perairan Bangka Belitung cocok untuk usaha budidaya laut seperti ikan kerapu, teripang, rumput laut, dan kerang-kerangan. Luas areal untuk budidaya laut adalah 120.000 Ha dengan potensi produksi 1.200.000 ton/tahun.

Permasalahan yang dihadapi adalah armada tangkap yang rata-rata masih di bawah 10 GT dan penggunaan alat tangkap yang sederhana, sementara lokasi tangkap semakin jauh karena adanya penambangan timah di wilayah laut. Maraknya penambangan di laut berdampak terjadinya pergeseran mata pencaharian dari nelayan menjadi penambang di laut. Kemudian masih minimnya kesadaran nelayan yang menyebabkan masih adanya nelayan yang masih menangkap ikan menggunakan bom, racun ikan, dan trawl.

Di samping sarana dan prasarana, pengolahan hasil laut juga penting mendapat perhatian dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Namun industri pengolahan hasil laut saat ini masih rendah dan masih dilakukan secara tradisional.

Berbagai permasalahan di atas membutuhkan kebijakan strategis di sektor kelautan dan perikanan, seperti sarana dan prasarana tangkap, pengendalian penambangan

laut, peningkatan kesadaran nelayan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

I. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan beraneka ragam, seperti hasil tambang (timah, kuarsa, minyak bumi), hasil pertanian dan perkebunan (sawit, lada, karet), hasil kelautan dan perikanan (ikan, rumput laut) yang memiliki nilai jual ekspor. SDA yang dimiliki tersebut harus dimanfaatkan dan didistribusikan secara adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA juga harus tetap memperhatikan keberlangsungan dan keasrian lingkungan hidup serta pemanfaatan tata ruang. Jika dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pemanfaatan dan pengelolaan SDA akan mampu mewujudkan strategi pembangunan yang berorientasi kepada *pro-poor, pro-job, pro-growth* serta *pro-environment*.

Timah saat ini masih menjadi komoditas utama sektor pertambangan. Timah merupakan SDA yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat nanti pasti akan habis. Oleh karena itu, harus segera disiapkan perencanaan paska timah dengan mempersiapkan berbagai sektor yang langsung berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata.

4.1.2. Sosial, Budaya, dan Sumber Daya Manusia

Persoalan-persoalan sosial, budaya, dan sumber daya manusia adalah persoalan yang pada dasarnya bersifat nirfisik. Meski demikian, berbagai persoalan di bidang ini merupakan persoalan yang sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan-persoalan penting di bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar. Sedangkan permasalahan budaya adalah yang berkenaan dengan nilai-nilai yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, menjadi pranata dasar, dan memiliki fungsi sebagai penyanggah tata tradisi daerah. Adapun permasalahan sumber daya manusia pada prinsipnya sangat terkait erat dengan kualitas anggota masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai penyedia layanan maupun sebagai individu terlayani.

Berdasarkan telaah data yang tersedia, beberapa permasalahan pembangunan yang terkait dengan persoalan sosial, budaya, dan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

A. Akses pelayanan dasar

Di bidang kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, hal ini bisa dilihat dari angka kematian bayi yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2007 angka kematian 6,91, maka pada tahun 2011 justru meningkat menjadi 8,39. Hal yang sama juga ditunjukkan juga pada aspek persentase balita dengan gizi buruk yang pada tahun 2007 sebesar 0,71 dan pada tahun 2011 menjadi 1,66. Angka perkembangan prevalensi HIV juga cenderung mengalami peningkatan, yakni 0,02 pada tahun 2007 menjadi 8,33 pada tahun 2011. Perkembangan angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk juga mengalami peningkatan, yakni 15,01 pada tahun 2007 menjadi 27,93 pada tahun 2011. Pada sektor infrastruktur, jumlah puskesmas juga masih relatif terbatas dengan penambahan yang tidak terlalu signifikan. Jumlah Puskesmas pada tahun 2007 sebanyak 50 puskesmas, sementara pada tahun 2011 hanya meningkat menjadi 58 Puskesmas. Rumah sakit hanya bertambah 2, yaitu rumah sakit swasta.

Sementara itu, di sektor pendidikan, akses terhadap pendidikan salah satunya dapat terlihat dari rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tingkat pemerataan yang rendah. Berdasarkan data yang tersedia, rata-rata lama sekolah tingkat provinsi menunjukkan tren meningkat, namun sebaran capaian relatif rendah. Pangkalpinang memegang angka rata-rata lama sekolah yang tertinggi untuk tahun 2010 sebesar 9,50 tahun sementara yang terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan angka 5,99 tahun. Adapun Kabupaten Bangka Tengah berada pada posisi kedua dari terendah, yakni sebesar 6,86 tahun dan Kabupaten Bangka Barat pada urutan keempat dengan angka 6,87 tahun.

Pelayanan di bidang pendidikan juga dapat dilihat dari tren angka partisipasi sekolah yang terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun di tiap jenjang pendidikan. Tren angka partisipasi sekolah fluktuatif pada tahun 2008 untuk tingkat SD/MI sebesar

95,77 % dan pada tahun 2011 sebesar 94, 63 %. Untuk tingkat SMP/MTs, data tahun 2007 menunjukkan angka 66,69 %, sementara pada tahun 2011 turun ke angka 65,90 %. Tren penurunan untuk tingkat SMA/K juga menunjukkan kondisi yang sama, yakni 47,73 % pada tahun 2007 dan turun ke angka 46,46 % pada tahun 2011. Sementara untuk angka partisipasi kasar (APK) juga mengalami penurunan dari kondisi awal dengan kondisi akhir, yakni 117,09 % pada tahun 2007 turun menjadi 114,64 % pada tahun 2011. Adapun angka partisipasi murni (APM) mengalami kondisi relatif fluktuatif sekalipun menunjukkan kenaikan dari kondisi awal.

Selain itu, akses terhadap ketersediaan sekolah juga terlihat tidak terlalu meningkat. Jika pada tahun 2007 rasio ketersediaan sekolah sebesar 23,49 %, maka pada tahun 2011 hanya meningkat menjadi 23,94 %.

Akses pelayanan dasar, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan kiranya menjadi persoalan penting dalam agenda pembangunan provinsi untuk lima tahun ke depan. Dua aspek yang menjadi kebutuhan dasar ini dengan demikian perlu menjadi salah satu skala prioritas utama.

B. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur pelayanan publik

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pelayanan publik di provinsi ini relatif belum optimal sekalipun menunjukkan tren yang positif. Di sektor kesehatan, kualitas sumber daya manusia diwarnai dengan persoalan keterbatasan pada jumlah tenaga medis. Keterbatasan dokter spesialis masih menjadi kendala pengembangan di sektor kesehatan. Disparitas antarkabupaten/kota untuk tenaga medis relatif tidak merata. Bahkan untuk data tahun 2011, Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung Timur belum memiliki dokter spesialis. Dokter spesialis masih menumpuk di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Meski secara umum terjadi peningkatan jumlah tenaga medis, namun aspek pemerataan dan spesialisasi masih memerlukan perhatian serius.

Di sektor pendidikan, rasio antara jumlah guru dan murid tidak begitu mengalami peningkatan signifikan dari tahun awal ke tahun akhir. Pada tahun 2007, rasio guru dan murid untuk tingkat SD/MI sebesar 17,84 % sementara pada tahun 2011 hanya

menjadi sebesar 16,44 %. Rasio guru dan murid untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2007 sebesar 14,02 % sementara pada tahun 2011 menjadi 14,27%. Adapun untuk tingkat SMA/K, rasio guru dan murid pada tahun 2007 sebesar 11,68 % sementara pada tahun 2011 menjadi sebesar 11,60 %. Rasio jumlah guru dan murid tingkat SD/MI terendah untuk tahun 2011 adalah Kabupaten Bangka Selatan, untuk tingkat SMP/MTs adalah Kabupaten Bangka, dan untuk tingkat SMA/K adalah Kabupaten Belitung.

C. Disparitas kemiskinan desa dan kota

Disparitas kemiskinan antara desa dan kota masih menunjukkan tren yang tidak berubah dari waktu ke waktu, yakni masih tetap lebih tingginya kemiskinan di desa dibandingkan dengan di kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih cenderung menjadi masalah besar di tingkat desa.

Tingkat kemiskinan di desa pada tahun 2008 sebesar 8,09 %, sementara di desa sebesar 10,87 %. Sekalipun terus mengalami penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, namun disparitas tersebut tetap tidak bergeser. Jika pada tahun 2011 angka kemiskinan di kota sebesar 3,35 %, maka angka kemiskinan di desa tetap lebih besar, yakni 6,91 %.

D. Tingginya pengangguran lulusan pendidikan dasar dan menengah

Tingkat pengangguran sepertinya masih didominasi oleh masyarakat yang memiliki pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan data pengangguran terbuka empat tahun terakhir, terlihat bahwa angka pengangguran terbuka masih bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, sekalipun jika dibandingkan dengan capaian awal, kondisi terakhir menunjukkan tren menurun yang relatif drastis. Pengangguran terbuka untuk tahun 2011 didominasi oleh masyarakat yang tidak berpendidikan SD atau sederajat, yaitu sebanyak 6.378, disusul SMTA umum sebanyak 6.125, SMTA Kejuruan sebanyak 5.329, dan SMTP sebanyak 3.079.

Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah diarahkan pada upaya menciptakan tenaga kerja produktif dengan memperkuat pendidikan nonformal. Tren di atas menunjukkan bahwa pengangguran terbuka didukung oleh

pendidikan yang kurang memadai sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan lulusan pendidikan menengah ke bawah yang lebih kreatif dan inovatif.

E. Dominasi pekerjaan di sektor pertanian dan pertambangan

Penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha menempatkan sektor pertambangan dan pertanian sebagai lapangan yang dominan. Sebanyak 152.884 orang bekerja di sektor pertanian dan sebanyak 148.549 orang bekerja di sektor pertambangan. Sementara sektor keuangan, angkutan, industri, dan listrik/gas/air masih relatif rendah.

Dominasi pada lapangan usaha tersebut pada dasarnya bersifat rentan karena sangat tergantung pada kondisi alam. Di sektor pertambangan, ketersediaan bahan mineral untuk ditambang akan mengancam kelangsungan sektor ini, begitu juga dengan sektor pertanian yang cenderung dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan kondisi alam. Oleh karena itu, ke depan perlu pengembangan sektor-sektor lain agar dominasi lapangan usaha dapat diminimalisir. Pembangunan ke depan harus diusahakan dapat memperluas lapangan kerja dan mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih potensial, seperti sektor wisata, industri kecil menengah, dan sektor jasa.

F. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikategorikan pesat. Pada tahun 2011, jumlah penduduk di provinsi ini sebesar 1.261.737 jiwa, pada tahun 2011 bertambah 38.441 jiwa atau menjadi 1.223.296 jiwa atau bertambah 155.080 jiwa dari tahun 2007. Laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 3,14 % dengan tingkat variasi yang berbeda antarkabupaten.

Laju pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 3,81 % dan terendah terjadi di Kabupaten Belitung sebesar 2,36 %. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di provinsi ini pada dasarnya tidak dikarenakan oleh faktor kelahiran, melainkan karena faktor migrasi. Laju pertumbuhan penduduk dan faktor migrasi merupakan isu yang harus diperhatikan karena akan berimplikasi pada sektor lain, misalnya pada sektor ketenagakerjaan,

kesejahteraan, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia.

G. Pemberdayaan perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut Indeks Pembangunan Gender dari tahun 2007 s.d. 2010 adalah 43,7%, 44,11%, 44,86%, dan 55,62%. Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender menunjukkan peningkatan yang tidak terlampau signifikan, yakni secara berturut-turut sejak tahun 2007 s.d. 2010 adalah 59%, 59,69%, 60,05%, dan 60,36%.

Indek Pembangunan Gender yang relatif stagnan di provinsi ini juga ditandai dengan peringkat secara nasional yang relatif rendah. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 berada di posisi ke empat dari bawah atau hanya berada di atas Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Irian Jaya Barat. Sementara untuk Indeks Pemberdayaan Gender juga berada di nomor urut empat dari bawah atau hanya berada di atas Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, dan Kalimantan Barat.

Kondisi ini mencerminkan bahwa masih ada persoalan dengan gender di provinsi ini. Selain secara nasional menunjukkan capaian yang rendah di bawah provinsi lain, peningkatan dari tahun ke tahun juga tidak menunjukkan angka yang signifikan.

H. Disparitas variabel pembentuk IPM

Ada beberapa variabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yakni rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka harapan hidup, dan pendapatan perkapita. Rata-rata lama sekolah untuk tahun 2010 adalah 7,45 tahun, angka melek huruf 95,69, angka harapan hidup 68,90, dan pendapatan perkapita 641,51.

Oleh karena angka Indeks Pembangunan Manusia ditentukan oleh keempat variabel tersebut, maka kesemua faktor saling mempengaruhi. Kesemua variabel harus mendapatkan porsi perhatian yang sama jika menginginkan angka Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan. Dari empat variabel tersebut, angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf terbilang lebih rendah dibandingkan

dengan dua variabel lainnya. Angka harapan hidup dan pendapatan perkapita provinsi ini terbilang baik. Perhatian pada aspek pendidikan sebagai komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dengan demikian harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan lima tahun ke depan.

I. Degradasi budaya lokal

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya adalah daerah dengan multietnis dan multibudaya. Konsekuensinya adalah keragaman budaya yang saling berinteraksi satu sama lain membentuk konfigurasi budaya yang unik dan khas Bangka Belitung. Sejauh ini, pengembangan budaya lokal masih berjalan lambat karena berbagai faktor. Lemahnya daya tahan budaya yang ditandai dengan budaya modernisasi di hampir semua lini membantu mempercepat degradasi budaya.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah seperti menghadapi kendala dalam pengembangan budaya lokal karena fokus yang masih dominan di sektor ekonomi dan pembangunan fisik. Budaya dan kekhasan lokal menjadi hal penting yang patut diperhatikan secara bersama-sama karena akan berkaitan dengan artefak nilai yang akan menjadi warisan budaya daerah. Sejauh ini, pengembangan budaya masih dilakukan secara tersekat oleh lembaga-lembaga seni daerah, para pelaku seni, dan kreator seni. Kiranya perlu koordinasi dan sinergi lintas daerah dan lintas bidang untuk kembali menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari kearifan lokal yang turut berkontribusi positif bagi pengembangan nilai-nilai lokal. Pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan kiranya diarahkan pada misi pengembangan budaya lokal.

4.1.3. Politik dan Pemerintahan

Keberhasilan kinerja suatu pemerintahan daerah dapat dilihat dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta tidak melaksanakan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (*good governance and clean government*). Masyarakat kini juga sudah dapat menilai kinerja pemerintahan melalui pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, indikator lain keberhasilan pemerintah daerah dalam sektor pemerintahan adalah kemampuannya dalam

mengelola belanja daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan dengan menyediakan pendanaan terkait dengan kebutuhan masyarakat (sarana, prasarana dan infrastruktur lain).

Di sisi lain, kepastian hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan wibawa pemerintahan. Dengan adanya kepastian hukum maka akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung stabilitas sosial politik.

Pemerintahan yang baik juga tidak terlepas dari transparansi pengelolaan keuangan daerah dan memberikan jaminan bagi efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang diharapkan adalah yang mampu membiayai pembangunan melalui penyediaan layanan dasar, infrastruktur sarana dan prasarana, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung daya saing daerah.

Adapun permasalahan pembangunan pada bidang politik dan pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. Pemerintahan yang bersih

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan secara berturut-turut mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah 80%. Data ini menunjukkan bahwa presentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan adalah relatif statis dan tidak menunjukkan perkembangan yang meningkat ataupun menurun dari tahun ke tahun.

Sementara itu, pemerintahan yang bersih juga dapat dilihat dari Jumlah Perda Pelayanan Satu Atap yang dimiliki oleh kabupaten/kota dari tahun 2007, 2008 dan 2009 yaitu 28.57, 14.29, dan 42.86. Data ini menunjukkan bahwa Jumlah Perda Pelayanan satu atap yang dimiliki oleh kabupaten/kota dari tahun 2007 sampai 2009 berfluktuasi. Ini berarti kuantitas produk perda yang dihasilkan pada tahun 2007 cukup produktif, namun menurun pada tahun 2008 dan mengalami pertambahan lagi pada tahun 2009. Kuantifikasi jumlah Perda pelayanan satu atap menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki komitmen yang relatif cukup kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.

B. Partisipasi politik masyarakat

Partisipasi politik masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012. Dari 872.102 pemilih dalam pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), hanya 536.365 orang menggunakan hak pilih. Sisanya, 335.797 atau 38,497 persen pemilih tidak menggunakan hak pilih atau golput. Ini artinya tingkat partisipasi politik masyarakat sangat rendah. Penyebabnya disebabkan oleh banyak faktor misalnya dari minimnya sosialisasi KPUD, apatisme masyarakat, pilihan politik warga dan seterusnya. Mengingat rendahnya angka partisipasi pemilih tersebut, maka fenomena golput ini perlu mendapat perhatian secara khusus.

C. Partisipasi politik perempuan

Persentase *Gender Development Index* (GDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam setiap tahun menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan tertinggi pada tahun 2008, yaitu 61,03. Persentase kenaikan GDI dari tahun 2004 sampai tahun 2008 yaitu 54,34, 55,44, 57,8, 59,00, dan 61,03. Angka *Gender Empowerment Measurement* (GEM) juga mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun walaupun tidak terlalu signifikan. Kenaikan angka GEM dari tahun 2004 sampai tahun 2008 yaitu 39,61, 40,22, 42,4, 43,7, dan 45,56. Disisi lain indeks pembangunan gender (IPG) tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Perkembangan IPG dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, yaitu 54,3, 55,4, 57,8, 59,69, 60,05, dan 60,36. Pembangunan dalam lima tahun ke depan kiranya memperhatikan aspek ini.

D. Penegakan hukum

Indeks Kriminalitas (Jumlah Tindak Pidana) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menunjukkan kenaikan kuantitas dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut dari tahun 2005 s.d. 2009 adalah 1596, 2032, 2232, 2529, dan 2570. Sementara itu, Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional cenderung menunjukan angka yang fluktuatif, yaitu naik pada tahun 2007 dan 2008, yaitu sebesar 57,09%, 58,53%, namun kemudian menurun drastis pada tahun 2009 yaitu

55,30%. Disisi lain, Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional relatif fluktuatif, yaitu 92,18 % pada tahun 2007, kemudian menurun pada tahun 2008, yaitu 90,84%, dan kemudian naik sempurna pada tahun 2009, yaitu 100%. Penegakkan hukum kiranya berkaitan dengan rasa nyaman dan tenang sehingga bersama-sama dengan para *stakeholders* terkait, aspek ini patut mendapatkan perhatian yang lebih intens.

E. Indeks Demokrasi Indonesia

Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama UNDP (Program Pembangunan PBB), bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2009, menyebutkan Provinsi Babel berada diposisi ke-20 dari 33 provinsi. Berdasarkan peringkat itu, artinya prestasi demokrasi Provinsi Babel rendah dibandingkan provinsi lain, berdasar tiga aspek yang diukur, yakni kebebasan sipil, pemenuhan hak politik dan kualitas kelembagaan demokrasi. Dalam pembangunan lima tahun mendatang, IDI kiranya perlu ditingkatkan dengan memberikan porsi program yang relevan dan memadai untuk ketiga aspek pengukuran tersebut.

F. Penguatan lembaga legislatif

Jumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2009-2014 berjumlah 45 orang dari 7 fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PKS, Bintang Amanat dan Fraksi Gerindra. Terkait dengan peran legislatif, perlu kiranya ditingkatkan kapasitas legislatif dalam hal pembuatan Perda yang bersifat inisiatif. Perda inisiatif akan membantu eksekutif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lepas dari kapasitas kelembagaan pemerintahan. Banyaknya Perda inisiatif selama ini juga menjadi indikator kapasitas lembaga legislatif.

4.1.4. Sumber daya alam dan lingkungan hidup

Segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas pembangunan akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai salah satu daerah penghasil tambang, maka Bangka Belitung sangat rentan terhadap perubahan lingkungan hidup. Penataan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

merupakan satu kesatuan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan, sehingga segala bentuk pemanfaatan tata ruang juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tata ruang. Pembangunan Bangka Belitung masih tergantung pada pengelolaan sumber daya alam disamping kualitas SDM. Oleh karena itu, pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, hasil laut, tambang dan lain-lain harus dioptimalkan dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, partisipatif dan berwawasan lingkungan.

Persentase lahan kritis di Bangka Belitung semakin meningkat. Sementara laju kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut akibat aktivitas pertambangan harus diminimalisir agar tidak berpengaruh terhadap sektor lainnya. Untuk itu percepatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas pertambangan harus menjadi konsentrasi bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

A. Alih fungsi hutan/lahan

Salah satu upaya menjadi kelestarian dan keseimbangan lingkungan adalah dengan alih fungsi hutan yang selektif agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Alih fungsi hutan harus mengikuti ketentuan dan syarat yang ketat sesuai dengan peruntukannya. Alih fungsi hutan/lahan yang tidak tepat akan berdampak bagi daerah sekitar, seperti menyebabkan terjadinya longsor, banjir dan lain-lain.

B. Kerusakan wilayah pesisir

Wilayah pesisir merupakan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi ini dapat dikembangkan pada sektor kelautan, pariwisata, perikanan dan lain-lain. Namun adanya kerusakan wilayah pesisir akan menghambat upaya pengembangan wilayah pesisir di berbagai sektor tersebut. Aktivitas penambangan di sekitar wilayah pesisir, berpotensi merusak hutan bakau dan terumbu karang yang ada dilaut. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan terpadu

wilayah pesisir dengan pengembangan potensi lintas sektor dan pengendalian pertambangan yang merusak wilayah pesisir.

C. Lahan Kritis

Perbandingan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2004 dengan tahun 2010, untuk lahan sangat kritis dan kritis mengalami penurunan masing-masing sebesar 95,88% dan 81,24%. Sementara luas lahan yang tergolong agak kritis, potensial dan tidak kritis mengalami kenaikan masing-masing sebesar 78,41%, 243,26% dan 149,23%. Secara umum, luas lahan kritis di provinsi ini tahun 2010 adalah 112,838.87 Ha atau 6,93 % dari luas seluruhnya wilayah yang tersebar di 7 kab/kota.

Data ini menunjukkan bahwa kondisi lahan di provinsi ini mengalami perbaikan karena luas lahan kritis mengalami penurunan dan lahan yang tidak kritis mengalami kenaikan. Kondisi ini merupakan hasil dari upaya penanaman, reklamasi dan perbaikan kualitas lingkungan oleh berbagai pihak. Namun demikian, penurunan luas lahan kritis ini masih belum mencapai titik optimal, karena penurunan tingkat kualitas lahan kritis pada tahun 2010 mendominasi pada tingkat potensial kritis. Perubahan parameter kondisi lahan masih menimbulkan luasan lahan kritis bertambah.

D. Pencemaran sungai dan wilayah pesisir

Pencemaran sungai kini sudah mulai terjadi dengan adanya aktivitas penambangan di sekitar sungai, pembuangan sampah ke sungai dan menjadikan sungai tempat pembuangan limbah industri. Sungai yang dulunya menjadi salah satu sumber air untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, kini tidak lagi bisa digunakan. Diperlukan adanya strategi pencegahan pencemaran sungai dengan sinergisitas antardaerah yang dilalui sungai, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan lingkungan sungai.

E. Illegal Mining, Illegal Fishing dan Illegal Logging

Besarnya potensi mineral timah, kelautan, dan kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan munculnya berbagai praktek illegal dalam

penambangan, pencurian ikan dan perambahan hutan. Kejahatan-kejahatan seperti ini membuat pengelolaan SDA tidak optimal dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut secara luas.

Permasalahan ini harus segera di atasi, baik secara preventif maupun represif melalui penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Berbagai bentuk pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan SDA harus dilakukan secara kontinyu dan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera. Praktek-praktek *illegal mining* yang melakukan penambangan tanpa izin, menambang di hutan lindung dan lain-lain, berpotensi akan merusak lingkungan dan hutan dan berpotensi kerugian negara karena hasil tambang yang tidak terhitung pajaknya. Begitupula dengan pencurian ikan dan hasil laut lainnya serta perusakan terumbu karang lambat laun akan merusak laut dan mengurangi hasil tangkap nelayan. Praktek illegal logging pun masih menjadi persoalan tersendiri di daerah ini di tengah keterbatasan kawasan hutan di kepulauan ini.

4.1.5. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Infrastruktur, prasarana dan sarana menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur akan membuka akses suatu daerah dan membuka akses segala aspek pembangunan. Sebagai daerah kepulauan, ketersediaan prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam mewujudkan konektivitas intern dan intrawilayah, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.

Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, seperti sarana dan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitas dan penyehatan lingkungan; sarana dan prasarana perumahan dan permukiman maupun sarana dan prasarana energi dan kelistrikan bagi memenuhi kebutuhan energi dan listrik masyarakat Bangka Belitung; serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika secara bertahap sampai ke pelosok perdesaan.

Adapun permasalahan pembangunan yang terkait dengan bidang infrastruktur, sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

A. Akses air bersih

Pemenuhan ketersediaan air bersih merupakan infrastruktur dasar. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan permukiman, perkantoran, maupun industri pariwisata sangat tergantung ketersediaan pasokan air bersih. Sehingga penyediaan akses air bersih perkotaan, perdesaan serta di kawasan wisata merupakan persoalan yang penting. Ketika musim kemarau masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih dengan kualitas baik, karena cadangan sumber air baku kering, sehingga masyarakat yang tidak memiliki sumur bor akan sulit mendapatkan air bersih.

Maraknya pembukaan lahan, penebangan hutan secara liar, aktivitas penambangan, serta peladangan berpindah-pindah memicu berkurangnya daerah resapan air, termasuk pembukaan lahan untuk perkebunan sawit akan memicu penyusutan air di sumber-sumber penyimpanan air seperti kolong (danau), rawa dan aliran sungai, sehingga ketika kemarau sumber-sumber air tersebut kering. Luas perkebunan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 mencapai 180 ribu hektar, dengan 160 ribu hektar dikuasai pengusaha, dan sisanya 20 ribu hektar oleh masyarakat.

Provinsi kepulauan Bangka Belitung memiliki 17 Kolong atau danau air tawar sebagai sumber air bersih yang tersebar di pulau Bangka dan Belitung, dengan luas total 160,5 hektar, dan memiliki volume tampung 4.457.009 m³. Kolong atau danau ini memiliki total kapasitas layanan sebesar 441,84 liter per detik.

Secara umum, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007 persentase rumah tangga terakses air bersih sebesar 64,51%, sedangkan pada tahun 2008 terjadi penurunan menjadi 63,03%. Sedangkan dari data PDAM pada tahun 2011 jumlah total pelanggan air minum sebanyak 15.285 pelanggan, sementara dalam tahun 2010 jumlah total pelanggan sebanyak 16.309 pelanggan, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 15.437 pelanggan.

B. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur dalam satu wilayah yang menunjang kelancaran pengembangan potensi yang tersedia. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi sumberdaya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum cukup memadai, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan infrastruktur lainnya. Sehingga sarana dan prasarana ini perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitas.

Pengembangan Kepulauan Bangka Belitung dengan karakteristik kepulauan, dukungan sektor perhubungan memiliki peran yang sangat penting, terutama dukungan transportasi laut dan udara. Perkembangan sarana dan prasarana perhubungan cenderung meningkat dan dapat menunjang terhadap pembangunan sektor-sektor lain. Untuk lebih mempercepat perkembangan sektor unggulan daerah, maka peningkatan prasarana dan sarana perhubungan masih sangat dibutuhkan, terutama prasarana transportasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk peningkatan jalan dan jembatan yang menghubungkan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

C. Akses pelabuhan laut dan udara

Perhubungan laut dan udara merupakan transportasi strategis bagi Provinsi kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan guna berinteraksi dengan daerah lain, baik antar wilayah di Bangka Belitung maupun dengan wilayah provinsi lainnya. Keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut maupun udara sangat menentukan kelancaran transportasi. Provinsi kepulauan Bangka Belitung memiliki 9 pelabuhan laut dengan sebaran 6 di wilayah Bangka dan 3 di Belitung. Serta 2 Pelabuhan udara 1 di Bangka dan 1 di Belitung.

Pada tahun 2012 *runway* Bandara Depati Amir sudah selesai diperpanjang mencapai 2.600 m dengan lebar 45 m sehingga telah dapat didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737-500, Air Bus dan tipe-tipe pesawat yang lainnya. Pembangunan *apron* dan terminal baru yang lebih representatif. Demikian juga dengan Bandara H.AS. Hannandjoedin Tanjungpandan juga diperpanjang menjadi

2.200 m dengan lebar 45 m agar dapat di darati oleh pesawat-pesawat yang lebih besar.

Kunjungan kapal di pelabuhan pangkalbalam dan pelabuhan kawasan pada tahun 2010 masih didominasi oleh kapal-kapal pelayaran dalam Negeri sebanyak 3.751 unit dengan berat 2.562.009 gross ton. Sedangkan untuk pelayaran luar Negeri sebanyak 195 unit dengan berat 213.961 gross ton.

Sejak 2007-2011, frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat di bandara Depati Amir meningkat sebesar 61,40% dengan 3.551 pada tahun 2007, meningkat menjadi 5.715 pada tahun 2011. Sementara untuk penumpang yang datang juga mengalami peningkatan 80,10%, pada tahun 2007 sebanyak 365.016 orang meningkat menjadi 657.467 orang pada tahun 2011. Sedangkan untuk penumpang yang berangkat dalam tahun lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 80,00%, dari 368.442 orang menjadi 666.793 orang.

Frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara H.AS. Hannandjoedin Tanjung Pandan pada tahun 2010 tercatat mengalami kenaikan sebesar 13,78% dibandingkan dengan tahun 2009. Demikian juga dengan jumlah kedatangan penumpang meningkat sekitar 26,65% dan keberangkatan penumpang meningkat 24,21%.

Oleh karena itu, ke depan pembangunan daerah harus mampu menjawab tuntutan akan kebutuhan terhadap pelabuhan laut dan udara sebagai jalur masuk dan keluar yang vital bagi masyarakat. Akses pelabuhan dan bandar udara yang memadai akan memacu perkembangan di sektor lain.

D. Akses listrik

Listrik merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan pembangunan, ketersediaan listrik yang memadai dapat mendorong tumbuh dan berkembang sektor lain, dengan demikian pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional juga akan ikut terdorong. Listrik dibutuhkan sektor rumah tangga, bisnis, industri, pelayanan sosial, serta perkantoran pemerintah dan swasta.

Walaupun Rasio elektrifikasi Provinsi Bangka Belitung dalam terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, namun pencapaiannya masih jauh dibawah rata-rata nasional

yang hingga kuartal pertama 2011 telah mencapai 67,99%, sedangkan Bangka Belitung dari data sejak 2008 rasio elektrifikasi sebesar 48,25%, tahun 2010 meningkat sebesar 52,32%, dan tahun 2011 sebesar menjadi 55,50%.

Peningkatan ini masih jauh dari harapan, masih terdapat sekitar 45,50% dari masyarakat bangka Belitung yang belum menikmati aliran listrik. Disisi lain kebutuhan akan listrik terus meningkat, berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah pembangkit listrik yang ada pada tahun 2011 sebanyak 58 unit, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 55 unit dengan jumlah produksi listrik yang dihasilkan sebesar 51.367.527 KWH pada tahun 2011, serta sebesar 11.454.048 KWH pada tahun 2010. PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011 mengelola kapasitas pembangkit sebesar 302.417 KVA, sedangkan 2010 mengelola kapasitas pembangkit sebesar 182.146 KVA, dengan daya terpasang sebanyak 89.392 KW pada tahun 2011, dan sebesar 86.854 KVA pada tahun 2010.

Sedangkan jumlah pelanggan PLN dalam tahun 2011 sebanyak 217.740 pelanggan, hal ini meningkat dari tahun 2010 sebanyak 150.812 pelanggan, distribusi terbanyak pada pelanggan rumah tangga sebesar 138.614 pelanggan, usaha dan lainnya sebesar 7.252 pelanggan, dinas/instansi sebanyak 1.579 pelanggan, serta industri sebanyak 116 pelanggan.

E. Infrastruktur perdesaan

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Pada tahun 2010, di Provinsi Bangka Belitung terbentang 476,64 km jalan yang berstatus jalan negara, dan pada tahun 2012 sepanjang 899 km berstatus jalan provinsi, dengan jenis permukaan beraspal. Berdasarkan kondisi jalan, pada tahun 2009 Panjang jalan nasional dalam kondisi Baik 62,61%, Sedang 28,40%, Buruk

9,00%, sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 kondisi jalan Baik 84,63%, Sedang 15,37%.

Guna membuka akses penambahan ruas jalan dan peningkatan status terus dilakukan, pembangunan jalan lingkar timur yang membuka akses kawasan wisata Rebo - Tanjung Ratu - Air Anyir - Pangkal Balam - Pasir Padi - dan Kota Pangkalpinang. Sedangkan pengalihan status dilakukan untuk jalan Tanjung Kelayang - Tanjung Tinggi di Belitung.

Jumlah kendaraan roda empat atau lebih yang telah membayar pajak dalam tahun 2010 tercatat sebanyak 39.582 kendaraan, terdiri dari bus/mini bus 16.822 unit bus, 6.238 unit truk, 2.090 unit sedan, 10.701 unit pick-up, 430 unit oplet dan 3.301 unit jeep. Sedangkan untuk kendaraan roda dua dalam tahun yang sama mencapai 254.625 unit.

Pada tahun 2011, kendaraan bermotor roda dua sebanyak 319.857, dalam tahun yang sama kendaraan roda empat berjumlah 45.321 unit, mobil barang 18.543 unit, mobil penumpang 26.099 unit, dan mobil bus 589 unit.

F. Infrastruktur kawasan wisata

Guna mendukung tujuan wisata, pengembangan dan penambahan infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara sangatlah penting dilakukan.

Jalan-jalan provinsi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan kota serta yang menghubungkan kota-kota kecamatan/objek wisata dalam keadaan baik, beraspal hotmix/beton, lebar cukup atau minimal 6 m, saluran drainase baik.

Pengembangan *runway* dan *apron* bandara Depati Amir Pangkalpinang dan bandara H.AS. Hannandjoedin Tanjungpandan terus dan telah dikembangkan, tujuannya agar memperlancar akses masuk dan keluar wisatawan ke Bangka Belitung. Meski demikian, infrastruktur kawasan wisata kiranya masih terus harus dikembangkan mengingat pengembangan wisata akan sangat ditentukan oleh kondisi sarana dan prasarana yang mendukung.

Permasalahan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun lima tahun ke depan (2012-2017) harus dipetakan dan diselesaikan melalui skala

prioritas. Tabulasi permasalahan pembangunan dan prioritas penyelesaiannya ditampilkan pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan dan Prioritas Pelaksanaan

No.	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pelaksanaan Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Bidang Ekonomi					
1	Ekonomi Kerakyatan	v	v	v	v	v
2	Peningkatan daya saing daerah	v	v	v	v	v
3	Pengembangan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau terpencil		v	v	v	
4	Inflasi	v	v			
5	Disparitas pembangunan	v	v	v	v	v
6	Pengembangan pariwisata	v	v	v	v	
7	Ketahanan pangan	v	v	v	v	v
8	Kelautan dan perikanan			v	v	v
9	Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam		v	v	v	
B.	Bidang Sosial, Budaya, dan Sumber Daya Manusia					
10	Akses pelayanan dasar	v	v			
11	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur pelayanan publik			v	v	v
12	Disparitas kemiskinan desa dan kota	v	v	v	v	v
13	Tingginya pengangguran lulusan pendidikan dasar dan menengah	v	v	v		
14	Dominasi pekerjaan di sektor pertanian dan pertambangan	v	v	v		
15	Laju pertumbuhan penduduk		v	v	v	
16	Pemberdayaan perempuan		v	v	v	v
17	Disparitas variabel pembentuk IPM	v	v	v		
18	Degradasi budaya lokal			v	v	v
C.	Bidang Politik dan Pemerintahan					
19	Pemerintahan yang bersih	v	v	v	v	v
20	Partisipasi politik masyarakat		v	v	v	
21	Partisipasi politik perempuan		v	v	v	
22	Penegakkan hukum	v	v			
23	Indeks Demokrasi Indonesia			v	v	v
24	Penguatan lembaga legislatif		v	v	v	
D.	Sumber daya alam dan lingkungan hidup					
26	Alih fungsi hutan/lahan	v	v			
27	Kerusakan wilayah pesisir	v	v	v		
28	Luasnya lahan Kritis			v	v	
29	Pencemaran sungai dan lahan pesisir				v	v
30	<i>Illegal Mining, Illegal Fishing dan Illegal Logging</i>		v	v		
E.	Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana					
31	Akses air bersih	v	v	v		
32	Sarana dan prasarana	v	v	v	v	
33	Akses pelabuhan laut dan udara		v	v	v	
34	Akses listrik	v	v	v	v	v
35	Infrastruktur perdesaan	v	v	v		
36	Infrastruktur kawasan wisata			v	v	v

Sumber : Tim Perumus RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017

4.2 Isu Strategis Internasional

Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengaruh dari dinamika yang terjadi secara global. Kondisi global terakhir ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan mengancam terhadap keberlangsungan ketersediaan Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM, Kesejahteraan Sosial, dan Lingkungan Hidup, dengan berlandaskan pada kondisi tersebut, maka pada tahun telah dicapai kesepakatan yang dituangkan ke dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals (MDG's)*.

MDG's merupakan komitmen internasional dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya MDG's, kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara negara miskin dan berkembang dengan negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, MDG's mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam MDG's. Oleh karena itu, MDG's menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Upaya percepatan pencapaian Target MDG's menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, dan ditingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDG's. *MDG's* terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Waktu pencapaian delapan tujuan millenium adalah selama 25 tahun, dengan tahun dasar Tahun 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2015. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

- 1) Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem;
- 2) Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua;

- 3) Mendorong Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 4) Menurunkan Angka Kematian Anak;
- 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil;
- 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
- 7) Memastikan Keberlanjutan Lingkungan; dan
- 8) Mengembangkan Kemitraan Global Untuk Pembangunan.

Hingga saat ini target-target MDG's telah diarusutamakan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan SKPD (Renstra dan Renja-SKPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (RKA dan DPA). Tujuan MDG's tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011-2015. RAD MDG's tersebut disusun dengan maksud dan tujuan agar menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya menyusun rencana kerja percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium.

4.3 Isu Strategis Nasional

4.3.1 Isu Strategis Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Wilayah Sumatera, berkaitan hal tersebut maka isu

strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di Wilayah Sumatera yang meliputi:

- 1) Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah;
- 2) Terbatasnya sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal;
- 3) Belum terintegrasinya jaringan transportasi intermoda wilayah;
- 4) Masih rendahnya Kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan;
- 5) Masih rendahnya kualitas birokrasi dan tata kelola;
- 6) Belum optimalnya pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil; serta
- 7) Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum optimal.

4.3.2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Untuk melaksanakan SPM tersebut masing-masing urusan dilaksanakan melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008)
 - a. Rasio pembinaan dan penataan perumahan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 23%.
- 2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008)
 - a. Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dan perlindungan dan bimbingan balai perlindungan sosial pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 27.217 orang;

- 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008)
 - a. Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan mutu airnya pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%;
 - b. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%.
- 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010)
 - a. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (dalam dan luar provinsi) pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.
- 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010)
 - a. Pengembangan kelembagaan, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatnya hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja diharapkan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 5,17%;
- 6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010)
 - a. Jumlah cadangan pangan masyarakat pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 22%;
- 7) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011)
 - a. Rasio pengembangan dan peningkatan fasilitas perhubungan melalui peningkatan fasilitas perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%;

- b. Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat, laut dan udara pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.
- 8) SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011)
 - a. Cakupan layanan regulasi perijinan bidang penanaman modal pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.

Adapun pelaksanaan SPM yang terkait dengan Bidang Kesenian tidak dicantumkan dalam indikator kinerja program, melainkan akan dituangkan ke dalam indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

4.3.3. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai wilayah yang menempati Koridor 1 (Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Jambi, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pangkalpinang) dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini memiliki potensi dan prospek yang luar biasa bagi Kepulauan Bangka Belitung yang harus dicapai di masa mendatang sesuai dengan target MP3EI hingga 2025.

Ditinjau dari Aspek Geo Strategis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I), serta berada di antara tiga pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, serta dapat terkoneksi dengan Koridor II Kalimantan dalam MP3EI.

Selanjutnya sesuai dengan tema Koridor Ekonomi Sumatera yaitu "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" provinsi ini memiliki potensi bahan tambang yang sangat potensial seperti timah serta bahan galian C lainnya (bauksit, kuarsa, kaolin, tanah liat, batu besi dan lain-lain). Selain bahan tambang terdapat juga potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, perkebunan

(Lada Putih/*Muntok white papper*), serta sangat potensial untuk dijadikan sebagai kawasan/daerah industri maritim seperti industri perkapalan.

Sejalan dengan konsep yang tertuang dalam MP3EI yaitu konektivitas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjembatani keterhubungan/koneksi antara pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yaitu melalui Koneksi “**Trans Babel**” yaitu jalur transportasi Sumatera – Kalimantan via Bangka Belitung dengan rute Pelabuhan Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) → Pelabuhan Tanjung Ulat (Muntok) → Pelabuhan Tanjung Berikat (Bangka Tengah) → Pelabuhan Tanjung Batu (Belitung) → Pelabuhan Manggar (Belitung Timur) → Pelabuhan Ketapang (Kalimantan Barat).

Konektivitas daerah ini dengan koridor utama tidak hanya dalam aspek perhubungan/transportasi, namun konektivitas juga dapat dilaksanakan dibidang energi, perdagangan, telekomunikasi, dan lain-lain.

Salah satu peran penting yang ditumpukan ke Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai wilayah utama yang akan menyatukan antara Koridor I Sumatera (Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Jambi, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pangkalpinang) dengan koridor III Kalimantan (Pontianak, Samarinda, Banjarmasin dan Palangkaraya).

Sebagai wilayah penghubung antara koridor I dengan Koridor III, pembangunan “Trans Babel” akan sangat strategis dan dibutuhkan. Trans Babel diharapkan dapat mendukung transportasi sabuk tengah Indonesia, dan akan menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan sehingga menimbulkan dampak ekonomi signifikan terhadap seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Posisi geo-strategis Kepulauan Bangka Belitung dalam Koridor I MP3EI memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Selain menjadi penyokong Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi (industri *tin chemical* dan *CPO*), koridor I juga menjadi pusat pariwisata. Hal ini dimulai dengan pengembangan Bandara Depati Amir sebagai Bandara Internasional.

4.4. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu-isu strategis daerah yang sangat terkait dengan visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diuraikan sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam**, yang dipengaruhi belum berkembangnya ekonomi kerakyatan; masih adanya disparitas pembangunan antar daerah; belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan); belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam; rendahnya daya saing daerah; pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum optimal; tingginya Inflasi; pengembangan pariwisata belum optimal; dan tingkat ketahanan pangan masih rendah.
- 2. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup**, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya kegiatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang; tingginya tingkat kerusakan lingkungan darat maupun laut; dan belum mantapnya pemanfaatan ruang.
- 3. Ketersediaan Prasarana dan Sarana yang belum memadai**, yang dipengaruhi oleh konektivitas inter dan intra wilayah belum optimal; pelayanan ketersediaan air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan masih rendah; penyediaan perumahan rakyat masih terbatas; dan rendahnya rasio elektrifikasi.
- 4. Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap**, yang dipengaruhi tingginya migrasi penduduk; masih lambannya laju pertumbuhan IPM; tingkat kemiskinan tertinggi berada di desa; masih adanya pengangguran; pengidap HIV/AIDS meningkat; keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih rendah; pembangunan belum responsif gender; dan pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal.
- 5. Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap**, yang dipengaruhi oleh pelayanan publik belum optimal; masih rendahnya kompetensi aparatur; kapasitas keuangan daerah masih rendah; belum maksimalnya peran gubernur

selaku wakil pemerintah pusat; dan masih terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan.

- 6. Sosial Budaya**, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kriminalitas; masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); pengendalian penyakit menular dan tidak menular; penanggulangan bencana; dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal.